

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID PELAKSANA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait: a. Dokumen perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa yang meliputi Detail Engineering Design (DED), Engineering Estimate (EE), Detail spesifikasi teknis, Rincian harga, perkiraan sendiri (HPS), Soft Built Drawing, Analisa harga satuan pekerjaan, Rencana kerja. b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, meliputi, dokumen tender/seleksi dan dokumen kualifikasi, Dokumen penawaran, dan aset penyedia, data peserta / penyedia barang/jasa, Informasi personil pokja pemilihan, dokumen hasil evaluasi penawaran, dan hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi; dokumen kontrak, rencana akhir, basic design d. Tahapan monitoring dan evaluasi, yang meliputi administrasi, cek lapangan, catatan, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi	a. UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP, pasal 17 huruf b, i, dan j b. UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang daftar informasi yang dikecualikan di Kementerian PUPR e. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah f. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP g. Peraturan kepala ANRI No. 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas h. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No. 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah j. Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai selesai pelaksanaan pekerjaan
2	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kota Samarinda (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD, BPKAD, Bappeda & Semua SKPD)	Pasal 17 huruf l UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUN No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak Menghindari terjadinya yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai ditetapkan dalam perda
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf l UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat Menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Tidak terbatas
4	Laporan Keuangan Tahun Berjalan	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Adanya pengungkapan secara prematur	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
5	Data menyangkut utang piutang ASN	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Melindungi rahasia kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dan perusahaan. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan	Tidak terbatas
6	Surat menyurat yang sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008	Menghambat jalannya kebijakan	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7	MOU/SPK yang Masih Dalam Proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Jika sudah terbit MOU/SPK
8	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Pasal 17 huruf b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bisa disalahgunakan	Dapat merugikan kepentingan hubungan dengan pihak ketiga	Permanen jika bersifat rahasia
9	Daftar Penilai Prestasi Kerja/SKP	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia, Melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang Tidak terbatas bersifat rahasia	Tidak terbatas
10	Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	UU.14 Th.2008 tentang KIP Ps 17/h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
11	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan proses dijatuhi hukuman: Proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, keberatan atas hukuman disiplin ASN	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Melindungi data rahasia pribadi kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan langsung atau yang mendapatkan kuasa daripadanya
12	Laporan Hasil LHP	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	Mengganggu penegakan hukum	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
13	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	Permanen
14	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat / staf	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
15	SK Pensiun	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
16	Infomasi Tentang Pertanahan yang Menyangkut Data Kepemilikan Aset Seseorang	UU .No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset; UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi, permen agraria No.03 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan 00 24 tahun 1997 bag. kesepuluh tentang penyalinan informasi data fisik dan yuridis	Ada kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak lain dan bisa berakibat sengketa	Melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah	Permanen

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
17	MOU/SPK yang Masih Dalam Proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Jika sudah terbit MOU/SPK
18	Laporan Hasil LHP	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	Mengganggu penegakan hukum	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
19	Arsip Vital yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Statis yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan KI atau pengadilan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
20	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
21	Biodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
22	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat / staf	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
23	Dokumen pengajuan ijin perkawinan / perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 3, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi, atau ketentuan lainnya yang menyangkut sifat penelitiannya	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
24	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara dan Agama	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik, dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (Kejaksaan)
25	Hasil pemeriksaan keamanan pangan produk pertanian		Informasi bisa disalahgunakan	Adanya pengungkapan secara prematur	Sampai selesai investigasi keamanan pangan

Samarinda, 29 September 2023
 PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

